



Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Sebagai Pilar Utama Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Angely Nafachatul Muna¹, Qomariyah², Ida Faridah³

^{1,2,3}IAI An Nawawi Purworejo Jawa Tengah Indonesia

e-mail: angelynafa111@gmail.com, qomariyah45670@gmail.com, Faridahida242@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i2.634>

Received: 17-01-2025

Accepted: 19-03-2025

Published: 24-03-2025

Abstract:

The Internal and External Quality Assurance System is a inevitability for elementary, secondary and also higher education Tall. Determination of quality assurance for all universities through the Quality Assurance System Higher Education (SPM Dikti) has been announced for a long time government. Based on Law No. 12 of 2012 about Higher Education. In line with this in schools as well SPM has been stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 28 of 2016 concerning Quality Assurance of Primary and Secondary Education in Chapter I General Provisions Article 1 paragraph 4. SPM makes a organization to become a quality culture, in addition to that it will improve also the image of the institution, especially in the world of education, which must meet the needs of users. However, in Indonesia, SPM Sometimes it is only carried out incidentally, meaning it is carried out and prepared for accreditation (SPME) of the Quality Assurance System External. So that the quality results described are sometimes not according to the truth. So it is appropriate for the Agency education in Indonesia needs to cultivate quality in his daily and routine. So we need to study how recommendations for good SPM implementation for Agencies Education in Indonesia.

Keywords: Influence, Quality of Education, Higher Education.

Abstrak:

Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal adalah suatu keniscayaan bagi sekolah dasar, menengah dan juga Perguruan Tinggi. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Senada dengan ini di sekolah juga sudah ditetapkan SPM dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4. SPM itu membuat suatu organisasi menjadi berbudaya mutu, selain itu akan meningkatkan juga citra instansi terlebih di dunia pendidikan yang harus memenuhi kebutuhan pengguna. Namun di Indonesia SPM ini terkadang dilaksakan hanya bersifat insidental artinya dilaksakan dan disiapkan untuk akreditasi (SPME) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sehingga hasil mutu yang digambarkan terkadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka selayakna Instansi pendidikan di Indonesia perlu membudayakan mutu dalam kesehariannya dan rutin. Maka perlu kita kaji

bagaimana rekomendasi implementasi SPM yang baik bagi Instansi Pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: mutu pendidikan, perguruan tinggi.

PENDAHULUAN

Sistem penjaminan mutu dalam lembaga pendidikan mutlak harus dijalankan dengan baik. Penjaminan mutu diperlukan sebagai alat untuk quality control/ pengawasan kualitas yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Menghasilkan lembaga pendidikan yang bermutu merupakan tanggungjawab pengelola pendidikan mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai pada pendidik dan tenaga kependidikan. Masyarakat memiliki hak sekaligus memiliki tanggung jawab terdapat hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas.

Lembaga pendidikan tinggi merupakan ujung tombak dalam peningkatan perkembangan masyarakat. Hal ini karena pendidikan tinggi memiliki tri darma yaitu pengajaran, penelitian, dan pegabdian msasyarakat. Transformasi lembaga pendidikan tinggi harus terus dilakukan untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pendidikan tinggi berkualitas sangat penting bagi sebuah negara. Terutama bagi negara-negara berkembang. Pendidikan tinggi dapat memainkan peran penting dalam transformasi keseluruhan negara. Diantaranya; 1) pendidikan tinggi dapat dan harus memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi negara; 2) pendidikan tinggi dapat berkontribusi pada perkembangan demokrasi di negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembaruan politik dan masyarakat; 3) pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan penegasan identitas sebuah bangsa, 4) pendidikan tinggi dapat berkontribusi untuk memperkuat posisi dan reputasi negara di kancah internasional (Matei & Iwinska, 2016).

Selanjutnya dalam laporan Bank Dunia menunjukkan pentingnya penjaminan mutu dan berimplikasi penting dalam beberapa hal yaitu: mobilitas peserta didik dan staf, penciptaan jenis baru lembaga pendidikan tinggi, kebebasan pengelolaam program akademik, penerapan pendidikan jarak jauh

dan domain lain di mana pendidikan tinggi melampaui batas-batas standar nasional yang telah ditetapkan (Bernhard, 2012).

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016) menjelaskan; “mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi”.

Jumlah perguruan tinggi Indonesia dapat dikatakan cukup besar. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia memiliki jumlah perguruan tinggi sebanyak 4.739 perguruan tinggi, 279.480 orang dosen, dan 5.904.857 orang mahasiswa. bahwa pendidikan tinggi di Indonesia masih belum dapat dikatakan berkualitas. Dari hasil penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), banyak lembaga pendidikan tinggi yang masih terakreditasi dengan nilai C. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi perlu melakukan pembenahan untuk terus meningkatkan mutunya. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat pendidikan tinggi dunia seperti: Times Higher Education (THE) dan webometrics perguruan tinggi Indonesia tidak ada yang berada di level 100 besar dunia bahkan Asia. Universitas Indonesia (UI) hanya mampu menempati peringkat 800an dan UI merupakan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dapat dibayangkan level perguruan tinggi lainnya yang berada di luar pulau Jawa termasuk PTKI.

Dengan pertumbuhan jumlah perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa yang semakin meningkat seiring dengan tuntutan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang juga makin besar, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang konkrit dan mendukung dari para pemangku kepentingan. Pendidikan tinggi di negara-negara maju memiliki sistem penjaminan mutu dengan model dan strategi tersendiri. Namun, pada umumnya sistem penjaminan mutu mereka terdiri dari penjaminan mutu

internal dan eksternal. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki dua kebijakan penjaminan mutu, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal.

METODE PENELITIAN

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library reseach) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian (Bagenda et al, 2022), di antaranya literatur tentang manajemen mutu, penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan tema penjaminan mutu, kemudian menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru terkait dengan penjaminan mutu pada lembaga pendidikan tinggi (Masrukhin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjaminan Mutu Internal

Gaspersz (2011:10) menjelaskan bahwa penjaminan mutu (quality assurance) yaitu semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberi kepercayaan yang cukup bahwa produk layanan akan memuaskan kebutuhan untuk mutu tertentu. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Hendrowati, 2016). Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa penjamin mutu pendidikan berhubungan dengan tindakan yang terencana dan terarah untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

Penjamin mutu internal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan pemetaan mutu sekolah. Pemetaan dilakukan secara nasional menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aplikasi tersebut bernama Rapor Penjaminan Mutu Pendidikan atau lebih populer dengan sebutan Rapor PMP. Data yang terdapat di dalam Rapor PMP akan digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai bahan evaluasi sekolah. Hasil penelitian baru-baru ini memperlihatkan bahwa ada tren yang kuat disebabkan oleh diberlakukannya sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi di Eropa terhadap penguatan mutu pendidikan. "Audit mutu" atau "audit kelembagaan" adalah sistem dan kebijakan yang paling banyak digunakan sebagai instrumen penjaminan mutu. Kajian ini juga menemukan bahwa refleksi terhadap peningkatan kualitas yang dihasilkan dari dalam lembaga (internal) adalah hal yang paling penting dicapai daripada dorongan lembaga eksternal (Corengia, et al., 2014).

Implementasi penjaminan mutu internal, penentuan program dan pelaksanaan seperti dikemukakan oleh Uchtiawati, dan Zawawi (2014) bahwa Sekolah melalui mekanisme yang telah ditentukan dapat menentukan tahap-tahap pelaksanaan jaminan mutu sebagai berikut: yaitu: plan (merencanakan), do (melaksanakan), dan melakukan tahap evaluation (mengevaluasi), secara berkelanjutan.

Al-Alawi et al., (2009) menemukan mekanisme penjaminan mutu internal, yaitu:

1. membentuk komite penjaminan mutu, seperti Lembaga Penjaminan Mutu;
2. mengundang konsultan penjaminan mutu;
3. menilai umpan balik;
4. mengembangkan software untuk pengarsipan dokumen jaminan mutu;
5. menetapkan sistem pengarsipan untuk dokumentasi penjaminan mutu;
6. mempersiapkan templet untuk spesifikasi program, spesifikasi mata kuliah, dan ujian akhir.

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Eropa membuat standar dan pedoman dalam upaya penjaminan mutu internal. Lembaga pendidikan akan dikatakan memiliki mutu jika telah bahkan melampaui standar dan pedoman tersebut. Standar dan pedoman ini merupakan satu kesatuan yang harus

mampu dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan tinggi Eropa. Untuk lebih jelaskan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu. Langkah awal sebuah lembaga pendidikan dalam upaya penjaminan mutu adalah membuat kebijakan dan prosedur langkah-langkah penjaminan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan mutu. Kebijakan harus mampu menciptakan budaya mutu dan kebijakan harus bersifat berkelanjutan/ terus menerus. Dalam hal ini penting bagi lembaga melibatkan seluruh stakeholdernya.
2. Persetujuan, pemantauan dan tinjauan berkala atas program dan penghargaan. Hal ini bertujuan agar lembaga memiliki mekanisme secara formal (SOP) adalah upaya pembuatan program-program di lembaganya serta cara memberikan reward atas keberhasilan program-program tersebut.
3. Penilaian mahasiswa. Proses evaluasi peserta didik harus dilakukan dengan transparan, artinya peserta didik harus diberitahu sebelumnya tentang kriteria, peraturan, dan prosedur yang akan menjadi bahan penilaian.
4. Penjaminan mutu tenaga pendidik. Tenaga pendidikan merupakan faktor utama dalam lembaga pendidikan, oleh karena itu lembaga pendidikan harus mampu menerapkan manajemen SDM yang berkelanjutan untuk upaya pengembangan-pengembangan tenaga pendidik. Memberikan motivasi dengan berbagai cara seperti kompensasi yang memadai, pembinaan dan lain sebagainya.
5. Sumber belajar dan dukungan siswa. Sumber belajar harus benar-benar dipastikan ketersediannya sebagai komitmen lembaga untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi lulusan. Setiap program-program yang ditawarkan harus terlebih dahulu dipersiapkan ketersediaan sumber belajarnya.
6. Sistem informasi. Penting bagi lembaga pendidikan untuk membuat sistem informasi sebagai alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian

menggunakan informasi untuk pengelolaan program studi dan kegiatan lainnya yang efektif.

7. Informasi publik. Memberikan informasi yang sesuai dan relevan kepada publik tentang program yang dimiliki dan ditawarkan merupakan tanggungjawab dan kewajiban lembaga pendidikan (ENQA, 2009).

Menurut Puspitasari (2018) kualitas atau mutu dalam pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung kepada kualitas perencanaan, kegiatan pelaksanaan, evaluasi atau penilaian dan program pengawasan. Kerja tim adalah faktor penting bagi sekolah untuk meningkatkan efektivitas operasional penjaminan kualitas internal (Praraksa et al., 2015). Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan oleh para ahli, penjaminan mutu perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu lembaga pendidikan dalam pelaksanaannya. Penjaminan mutu internal harus dilaksanakan secara konsisten demi mewujudkan lembaga pendidikan dasar yang mencapai budaya mutu.

B. Penjamin Mutu Eksternal

Cheung & Tsui (2010) mendefinisikan penjaminan mutu eksternal sebagai a process of sharing experience and benchmarking against best practices. Penjaminan mutu eksternal merupakan sebuah rangkaian proses berbagi pengalaman dan benchmark terhadap praktik pendidikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk membantu, membuat rekomendasi, dan memberikan saran untuk mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keragaman. Demi kelancaran prosedur, akuntabilitas dan integritas lembaga penjamin mutu eksternal, maka orang-orang yang akan melakukan prosesnya (asesor) harus memiliki kompetensi. Cheung (2015) menjabarkan kompetensi penting yang harus dimiliki praktisi penjaminan mutu eksternal. Kompetensi tersebut antara lain: memiliki profesional, mampu memeriksa dengan sistematis, mampu menganalisis situasi, kemampuan manajemen, reflektif, dan memiliki kompetensi interpersonal.

Penjamin Mutu Eksternal Cheung & Tsui (2010) mendefinisikan penjaminan mutu eksternal sebagai a process of sharing experience and

benchmarking against best practices. Penjaminan mutu eksternal merupakan sebuah rangkaian proses berbagi pengalaman dan benchmark terhadap praktik pendidikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk membantu, membuat rekomendasi, dan memberikan saran untuk mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keragaman. Demi kelancaran prosedur, akuntabilitas dan integritas lembaga penjamin mutu eksternal, maka orang-orang yang akan melakukan prosesnya (asesor) harus memiliki kompetensi. Cheung (2015) menjabarkan kompetensi penting yang harus dimiliki praktisi penjaminan mutu eksternal. Kompetensi tersebut antara lain: memiliki profesional, mampu memeriksa dengan sistematis, mampu menganalisis situasi, kemampuan manajemen, reflektif, dan memiliki kompetensi interpersonal.

Penjaminan mutu eksternal juga harus sesuai dengan tujuan. Setiap proses didesain untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kelima, pelaporan. Pemberian laporan harus bersifat sesederhana mungkin agar mudah difahami. Seluruh hasil penjaminan mutu eksternal baik itu rekomendasi, pujian dan lain sebagainya harus ditampilkan untuk bahan evaluasi. Keenam, prosedur tindak lanjut. Penjaminan mutu yang bersifat rekomendasi untuk tindakan perbaikan, harus memiliki prosedur tindak lanjut yang telah ditentukan yang dilaksanakan secara konsisten. Ketujuh, tinjauan berkala. Proses penjaminan mutu eksternal baik untuk institusi maupun program studi harus dilaksanakan secara berkala, Kedelapan, analisis seluruh sistem: Lembaga penjaminan mutu eksternal harus menghasilkan ringkasan laporan yang menggambarkan dan menganalisis temuan umum dari analisis data, evaluasi, penilaian, dan lainnya (ENQA, 2009). Proses penjaminan mutu eksternal harus mengembangkan prosedur yang akan dilaksanakan kemudian mempublikasikannya atau memberikan informasi kepada lembaga pendidikan. Penjaminan mutu eksternal juga akan melihai penjaminan mutu internal dalam sebuah lembaga pendidikan.

C. Kontribusi Penjaminan Mutu terhadap Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu merupakan topik bahasan yang selalu dibahas dalam berbagai kesempatan diskusi dalam lembaga pendidikan. Peningkatan mutu dianggap dapat mempengaruhi kualitas hasil lulusan suatu lembaga. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan inovasi dan terobosan baru guna meningkatkan mutu pendidikan (Shobri, 2017). Dalam jenjang sekolah dasar, mutu pendidikan diharapkan benar-benar mencetak generasi berkualitas yang siap melanjutkan ke jenjang menengah. Jenjang menengah yang dimaksud dapat berupa Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau sekolah-sekolah lain sesuai minat peserta didik. Goetsch & Davis (2014) menjelaskan mutu adalah keadaan dinamis yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan dan membantu menghasilkan keunggulan. Peneliti menyimpulkan bahwa suatu lembaga dikatakan bermutu jika dapat berubah memperbaiki semua hal yang terlibat di dalam suatu lembaga, misalnya sistem pendidikan, sarana dan prasarana, guru, peserta didik, serta perangkat sekolah dasar dalam penelitian ini.

Adi Wibowo, Ahmad Zawawi Subhan (2020) mengatakan hal itu sejalan dengan pengertian pendidikan yang tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 yang berbunyi "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Karena itu sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pada peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga diperlukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Terdapat lima tujuan untuk penjaminan mutu pada lembaga pendidikan, yaitu: *improvement, innovation, communication, motivation and control* (Rosa, 2014). Kelima acuan ini dapat menjadi acuan dalam penjaminan mutu pendidikan dasar. Untuk lebih jelas tentang masing-masing tujuan tersebut, maka diuraikan sebagai berikut: *Improvement*: Tujuan yang pertama dari penjaminan mutu adalah untuk peningkatan lembaga pendidikan. Tujuan ini mencerminkan bahwa penjaminan mutu menjadi salah satu cara agar lembaga pendidikan mengalami peningkatan dan perkembangan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu harus mengarah pada upaya-upaya peningkatan mutu khususnya pada bidang-bidang akademik atau yang berkenaan langsung dengan proses pembelajaran. *Innovation*: Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai bahan berinovasi. Inovasi berbeda dengan perbaikan. Inovasi bertujuan mencari sesuatu atau menemukan hal baru. Penjaminan mutu berperan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam lembaga pendidikan, karena mutu yang baik harus terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Perbaikan proses dan metodologi pembelajaran, sistem informasi, manajemen serta penelitian harus terus dilakukan guna menjadi lebih baik dan *up to date*. *Communication*: Selanjutnya tujuan penjaminan mutu adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi disini maksudnya sebagai pemberi informasi kepada para civitas akademika tentang apa yang sudah ada dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu tujuan ini untuk memberikan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya tentang capaian yang diraih oleh lembaga pendidikan. *Motivation*: Tujuan motivasi berkaitan dengan sikap dan perilaku civitas dalam menghadapi dan menanggapi hasil penjaminan mutu. Civitas akademik akan terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan melihat hasil dari penjaminan mutu. Jika hasil penjaminan mutu belum menunjukkan hasil yang maksimal maka civitas akan terdorong untuk melakukan perbaikan. Jika hasil sudah menunjukkan kesempurnaan/ baik, mereka akan termotivasi untuk terus mempertahankannya dengan melakukan praktik-praktik yang baik.

Control: Tujuan yang terakhir adalah kontrol/ pengawasan. Pelaksanaan penjaminan mutu akan memberikan umpan balik dari hasil pemeriksaan/ asesmennya kepada lembaga pendidikan. Hasil ini akan mejadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan kemudian melakukan perbaikan. Pengawasan akan dilakukan dan dipraktikkan yang bertujuan mengantisipasi hasil rekomadasi dari penjaminan mutu. Pengelola akan melakukan kontrol agar rekomendasi yang baik tetap dipertahankan dan dikembangkan sedangkan rekomendasi perbaikan dipastikan tidak akan terjadi kembali. Selanjutnya untuk mempertahankan penjaminan mutu diperlukan konsep yang benar-benar dapat diterima oleh semua kalangan.

KESIMPULAN

Pendidikan dasar merupakan fondasi peserta didik untuk kehidupan yang akan datang. Peadaban zaman yang semakin maju menuntut pendidikan dasar untuk terus melakukan perbaikan mutu pendidikan guna mewujudkan kualitas lulusan yang terbaik. Pendidikan dikatakan bermutu jika mampu memenuhi dan menjalankan sesuai standar pendidikan yang berlaku, memiliki Rapot PMP yang terbaik. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu maka lembaga pendidikan perlu melakukan proses-proses penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Proses tersebut menjadi bahan evaluasi tentang apa yang belum dicapai dan yang harus pertahankan. Lembaga pendidikan perlu bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk dapat memberikan hasil terbaik.

Sulaiman dan Wibowo (2016) menyatakan cita-cita, harapan akan mutu sebuah lulusan membutuhkan sebuah sistem penjaminan mutu agar mutu lulusan dapat ditingkatkan diupayakan berkelanjutan. Jika belum diperoleh peningkatan mutu sesuai yang diharapkan, kepala sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah perlu melakukan refleksi dan mengidentifikasi penyebab keadaan tersebut. Analisis kualitatif perlu dilakukan secara lebih mendalam untuk memperbaiki program dan kegiatan pada semester selanjutnya (Sani dkk., 2018, hlm. 38).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wibowo, Ahmad Zawawi Subhan, (2020) Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Vol. 3, No. 2: 110-111.
- Al-Alawi, Y., Al-Kaabi, D., Rashdan, S., & Al-Khaleefa, L. (2009). Quality Assurance and Continuous Improvement: A Case Study of The University of Bahrain. *Quality in Higher Education*, 15(1), 61-69.
- Bagenda, E. C., Hasnawati, C., Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, M., Asdiana, R. A., & Shobri, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (Library research). *Bandung: CV. Media Sains Indonesia*.
- Cheung, J. C. M. (2015). Professionalism, Profession and Quality Assurance Practitioners in External Quality Assurance Agencies in Higher Education. *Quality in Higher Education*, 21(2), 151-170.
- Corengia, Á., Del Bello, J. C., Pita Carranza, M., & Adrogué, C. (2014). Quality Assurance Systems of Higher Education - The Case of European Institutions: Origin, Evolution and Trends. *Revista Gestao Universitaria Na America Latina - GUAL*, 7(3), 61-76.
- Darman, Darwin, dan Yusnadi. 2017. Implication of Internal Quality Assurance System of Schools Implementation Against the Accreditation rating of State Senior High Schools of Natuna, Riau Island Province. *Journal of Research & Method in Education* Volume 7, Issue 5 36-39.
- David L. Goetsch dan Stanley Davis. (2014). *Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production* (pearson ne). Edinburgh: Pearson.
- Praraksa, P., Sroinam, S., Inthusamith, M., & Pawarinyanon, M. (2015). Model of Factors Influencing Internal Quality Assurance Operational Effectiveness of the Small Sized Primary Schools in Northeast Thailand. *Social and Behavioral Sciences*, 197: 1586-1590.
- Puspitasari, H. (2018). Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem penjaminan Mutu Internal di Sekolah. *Muslim Heritage*, 1: 339-368.
- Rosa, M. J. (2014). The Academic Constituency. In M. J. Rosa & A. Amaral (Eds.). *Quality Assurance in Higher Education: Contemporary Debates* (pp. 181-206). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Sani, R. A., Arifin, R. S., Rif'an, M., & Triatna, C. (2018). *Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Tangerang: Tiara Smart.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U.B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. 4: 17-32.
- Shobri, M. (2017). Strategi meningkatkan mutu pendidikan di madrasah aliyah hasan jufri. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 11-26.